

Rancangan Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Di Desa Majasari

Somadi

Universitas Wanita Internasional

Jl. Pasir Kaliki No. 179 A Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

*corresponding author

somadi@iwu.ac.id¹*

<https://doi.org/10.29407/nusamba.v10i2.23097>

Informasi Artikel

Tanggal masuk 12 Juli 2024

Tanggal revisi 25 April 2025

Tanggal diterima 25 Juli 2025

Keywords : village head;
leadership; leadership strategies



Abstract

Research aim : This study aims to determine the obstacles to the implementation of village head leadership and village head leadership strategies in the implementation of Majasari Village Government.

Design/Method/Approach : This research uses a qualitative approach with data analysis techniques, namely SWOT analysis.

Research Finding : The obstacles faced in implementing village head leadership in Majasari Village are administrative obstacles. The village head's leadership strategy in Majasari Village is an aggressive strategy.

Practitioner/Policy implication : The leadership strategy implemented by the village head in Majasari Village is an aggressive strategy.

Research limitation : The research focuses on the leadership of the village head in Majasari Village.

Abstrak

Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala penerapan kepemimpinan kepala desa dan strategi kepemimpinan kepala desa pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa Majasari.

Desain/Metode/Pendekatan : Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data yakni analisis SWOT.

Temuan Penelitian : Kendala yang dihadapi dalam penerapan kepemimpinan kepala desa di Desa Majasari adalah kendala administrasi. Adapun strategi kepemimpinan kepala desa di Desa Majasari adalah strategi agresif.

Kontribusi Teoritis/ Originalitas : Strategi kepemimpinan yang diterapkan kepala desa di Desa Majasari adalah strategi agresif.

Implikasi Praktis : Pemerintah Desa Majasari dapat menerapkan strategi kepemimpinan kepala desa berupa strategi agresif untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian berfokus pada kepemimpinan kepala desa di Desa Majasari.

Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 memberikan perubahan yang besar bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan karena desa memiliki peran penting dalam pembangunan sebuah negara. Berdasarkan otonomi desa, desa diberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya

yang dimilikinya seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya.

Otonomi desa memberikan energi baru bagi penduduk desa untuk membangun desanya menjadi desa maju atau desa mandiri. Selain itu, adanya otonomi desa diharapkan permasalahan yang ada di desa seperti kualitas SDM yang rendah, infrastruktur yang belum memadai, kemiskinan, pengangguran, dan permasalahan lainnya dapat diatasi dan tidak menjadi penyakit akut yang ada di desa. Namun demikian, Pemerintah juga tidak berpangku tangan untuk menyerahkan seluruhnya pengentasan permasalahan di desa kepada Pemerintah Desa. Hal ini terlihat adanya dukungan dari Pemerintah berupa pemberian dana desa dan bantuan yang lainnya guna pengentasan permasalahan yang ada di desa dan kelancaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kesuksesan dan kegagalan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terlepas dari peran kepala desa sebagai seorang pemimpin di desa yang dibantu oleh perangkat desa. Sehingga maju mundurnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa bergantung kepada penerapan kepemimpinan kepala desa yang berdampak pada kinerja perangkat desa yang berimplikasi pada kinerja Pemerintahan Desa. Kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala desa memiliki peran penting dalam pembangunan dan penentu tercapainya atau tidaknya rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan kualitas dari seorang kepala desa dalam mengorganisir dan mengkoordinir perangkat desa dan lembaga desa untuk bekerja sesuai bidangnya masing-masing [1].

Pada konteks pembangunan desa, kepala desa merupakan figur terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan desa [2]. Sehingga kepemimpinan kepala desa berhubungan erat dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu pemerintahan desa. Dengan demikian, kegagalan atau kesuksesan suatu organisasi ditentukan salah satunya adalah penerapan kepemimpinan di dalam organisasi tersebut [3]. Kepala desa merupakan figur yang dapat menentukan keefektifan kinerja pemerintahan desa [4].

Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya merupakan bentuk kepemimpinan yang harus dijalankan seseorang berdasarkan peraturan pemerintah pusat. Sehingga orientasi kepemimpinan kepala desa yaitu melaksanakan sebaik-baiknya tugas-tugas yang diberikan kepada pemerintah pusat guna mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan untuk desa dengan mengedepankan partisipasi masyarakat [2]. Kepemimpinan kepala desa selalu dihubungkan dengan kegiatan pengarahan, pemberian motivasi, komunikasi, pengambilan keputusan, dan pengawasan untuk mewujudkan tujuan Pemerintahan Desa. Dengan demikian, bahwa pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ditentukan oleh kepemimpinan kepala

desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka membangun desa.

Namun demikian, saat ini masih cukup banyak penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga desa tersebut berada pada status desa tertinggal, bahkan desa sangat tertinggal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala salah satunya adalah penerapan kepemimpinan kepala desa. Dengan demikian diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya melalui studi komparatif kepada desa-desa yang telah berhasil melaksanakan pembangunan desa [5].

Pemerintahan Desa Majasari yang berlokasi di Kabupaten Indramayu merupakan salah satu desa yang dianggap berhasil karena telah melakukan perubahan dari desa tertinggal menjadi desa mandiri dan telah meraih berbagai penghargaan baik penghargaan pada tingkat daerah, tingkat provinsi maupun tingkat nasional khususnya regional Jawa-Bali. Prestasi tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala desa. Keberhasilan yang diraih oleh Desa Majasari diharapkan dapat ditularkan kepada desa lain dengan status desa sangat tertinggal maupun desa tertinggal. Dengan demikian, diharapkan desa-desa tersebut dapat bertransformasi menjadi desa maju atau desa mandiri.

Pola kepemimpinan pada masing-masing desa berbeda-beda tergantung pendekatan yang diterapkan oleh kepala desa. Adapun pertimbangan dalam menerapkan kepemimpinan tersebut diantaranya budaya masyarakat, kepribadian, pengalaman, kemampuan dan pendidikan kepala desa, dan berbagai pertimbangan lainnya termasuk kondisi perangkat desa. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, maka kepala desa dapat memutuskan pola kepemimpinan yang tepat untuk membangun desanya dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Akan tetapi, meskipun Pemerintahan Desa Majasari merupakan desa mandiri dan telah meraih berbagai penghargaan, namun saat ini Pemerintahan Desa Majasari mulai kesulitan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa salah satunya disebabkan oleh penerapan kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala desa sehingga membuat kinerja Pemerintahan Desa yang tercermin pada kinerja perangkat desa mengalami penurunan. Kinerja perangkat desa memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tercermin pada pelayanan masyarakat. Hal ini terlihat dari berbagai program yang telah direncanakan sebelumnya tidak berjalan dengan lancar, perubahan program/rencana, dan adanya komplain dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan oleh desa dan program-program yang dijalankan oleh desa. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Zuliansyah et al (2020), bahwa Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sesuai Undang-Undang Desa yaitu Pemerintah Desa belum mampu untuk merancang kebutuhan masyarakat yang partisipatif dan

transparan [6]. Selain itu, Desa Majasari juga mulai kesulitan untuk bersaing dengan desa lain yang kini mulai menjelma menjadi desa mandiri untuk mengalahkan status Desa Majasari merupakan desa juara tingkat kabupaten, provinsi dan nasional regional jawa-bali.

Berdasarkan hasil penelitian dari Damayanti et al, bahwa permasalahan di desa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengawasan dan kepemimpinan kepala desa [7]. Dengan demikian, kepemimpinan kepala desa sangat mempengaruhi keberhasilan tujuan pembangunan desa sehingga dibutuhkan kepala desa yang memiliki dedikasi tinggi dan komitmen untuk membangun desa [8]. Kepemimpinan merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pola kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala akan mempengaruhi intensitas partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di desanya [4].

Dengan demikian, diperlukan strategi kepemimpinan kepala desa yang dapat meningkatkan kinerja perangkat desa sehingga Pemerintahan Desa Majasari masih bertahan menjadi desa maju atau berubah menjadi desa mandiri. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apa kendala yang dapat menghambat penerapan kepemimpinan kepala desa, dan strategi kepemimpinan kepala desa pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa Majasari. Untuk itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui kendala yang dapat menghambat penerapan kepemimpinan kepala desa, dan menyusun strategi kepemimpinan kepala desa pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa Majasari. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa khususnya kepala desa untuk menerapkan pola kepemimpinan pada menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

Pernyataan Masalah Penelitian

Pemerintah Desa Majasari mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini terlihat dari berbagai program yang telah direncanakan sebelumnya tidak berjalan dengan lancar, adanya perubahan program/rencana, dan adanya komplain dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa dan program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa. Kondisi tersebut terjadi tidak lepas dari penerapan kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala desa dan kendala yang dihadapi dalam penerapan kepemimpinan kepala desa. Untuk itu diperlukan strategi kepemimpinan kepala desa yang dapat membuat penyelenggaraan Pemerintahan Desa Majasari berjalan dengan lancar.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kendala yang dapat menghambat penerapan kepemimpinan kepala desa, dan menyusun strategi kepemimpinan kepala desa pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa Majasari.

Metode

Penelitian menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakan yakni analisis SWOT. Hal ini disebabkan karena penelitian ini mencari kendala penerapan kepemimpinan kepala desa dan strategi kepemimpinan kepala desa. Penelitian dilaksanakan menggunakan studi kasus tunggal. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kepemimpinan kepala desa, sedangkan unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu. Adapun alasan pemilihan Pemerintahan Desa Majasari sebagai tempat penelitian karena Desa Majasari merupakan desa yang meraih penghargaan desa terbaik pada tingkat daerah, tingkat provinsi maupun tingkat nasional khususnya regional Jawa-Bali. Keberhasilan yang diraih oleh Desa Majasari diharapkan dapat ditularkan kepada desa lain. Namun dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Majasari masih menghadapi berbagai kendala untuk menerapkan pola kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala desa sehingga diperlukan strategi agar pola kepemimpinan kepala desa dapat diimplementasikan dengan baik.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Pengumpulan data dilaksanakan selama 6 hari (terhitung dari tanggal 3 juni 2024 sampai dengan 8 juni 2024). Wawancara dengan informan dibantu kuesioner yang bersifat terbuka. Adapun karakteristik informan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua informan yakni informan eksternal dan informan internal. Informan eksternal terdiri dari Masyarakat Desa Majasari, Badan Permusyawaratan Desa Majasari, dan Camat Kecamatan Sliyeg. Sementara itu, informan internal terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga Desa, dan Kepala Desa. Perangkat Desa Majasari, meliputi: Bekel, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kliwon, Lambang, Lebe, Lurah, Malang, Sekretaris Desa. Sedangkan Lembaga Desa Majasari, meliputi: ketua PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), ketua Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), ketua Fokorgaki (Pengurus Forum Komunikasi RTRW), ketua DKM (Dewan Kemakmuran Masjid), ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Perwakilan Desa Majasari, ketua BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), ketua PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), dan ketua Karang Taruna.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut.

1. **Kendala Penerapan Kepemimpinan Kepala Desa di Pemerintahan Desa Majasari**

Kepala desa menghadapi berbagai kendala dalam menerapkan kepemimpinan kepala desa. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan kepemimpinan kepala desa terbagi menjadi dua kendala yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang dihadapi dalam penerapan kepemimpinan kepala desa, antara lain yaitu:

- a. Pemahaman masyarakat dalam pengurusan pelayanan.
- b. Sikap masyarakat.
- c. Pendidikan dan kemampuan masyarakat.
- d. Kondisi dan ketersediaan teknologi.
- e. Pemahaman perangkat desa.

Sementara itu, kendala eksternal yang dihadapi dalam penerapan kepemimpinan kepala desa antara lain sebagai berikut:

- a. Ketersediaan blangko administrasi kependudukan.
- b. Waktu pengurusan administrasi.
- c. Pencairan anggaran desa.
- d. Perubahan dan tumpang tindih kebijakan.
- e. Dukungan kebijakan.
- f. Koordinasi antar instansi.
- g. Alih fungsi lahan.
- h. Budaya asing.

2. **Strategi Kepemimpinan Kepala Desa**

Untuk merumuskan strategi kepemimpinan kepala desa, maka perlu dipetakan hal-hal yang termasuk ke dalam IFAS maupun EFAS.

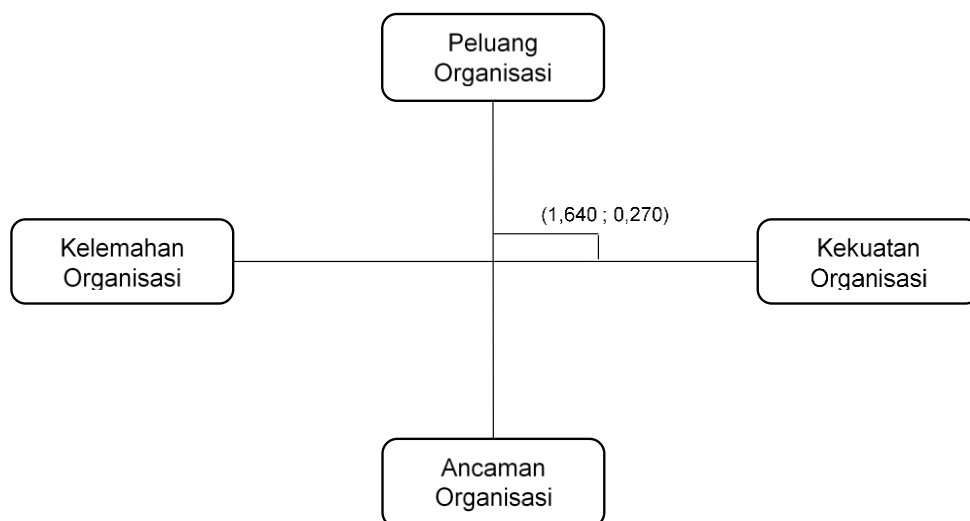


Tabel 1. IFAS dan EFAS

No	Uraian	Bobot	Rating	Nilai
A	Faktor Internal			
	<u>Kekuatan (Strengths)</u>			
1	<u>Konsep pembangunan desa bertumpuh pada gotong royong</u>	<u>0,100</u>	<u>5,000</u>	<u>0,500</u>
2	<u>Partisipasi masyarakat dan semua pihak dalam pembangunan desa</u>	<u>0,100</u>	<u>5,000</u>	<u>0,500</u>
3	<u>Ketersediaan visi, misi dan strategi serta rencana Pemerintahan Desa</u>	<u>0,100</u>	<u>5,000</u>	<u>0,500</u>
4	<u>Ketersediaan dan peran aktif lembaga desa</u>	<u>0,030</u>	<u>5,000</u>	<u>0,150</u>
5	<u>Komitmen kepala desa dalam pembangunan desa</u>	<u>0,080</u>	<u>5,000</u>	<u>0,400</u>
6	<u>Monetering dan evaluasi pembangunan desa</u>	<u>0,060</u>	<u>5,000</u>	<u>0,300</u>
7	<u>Kemampuan pencarian sumber pendanaan pembangunan</u>	<u>0,040</u>	<u>4,000</u>	<u>0,160</u>
8	<u>Pelaksanaan penggunaan APBDes</u>	<u>0,040</u>	<u>4,000</u>	<u>0,160</u>
9	<u>Potensi desa</u>	<u>0,020</u>	<u>3,000</u>	<u>0,060</u>
10	<u>Lokasi desa</u>	<u>0,010</u>	<u>3,000</u>	<u>0,030</u>
11	<u>Keanekaragaman mata pencaharian penduduk</u>	<u>0,010</u>	<u>3,000</u>	<u>0,030</u>
12	<u>Stabilitas sosial, politik, keamanan, dan ketertiban masyarakat</u>	<u>0,030</u>	<u>4,000</u>	<u>0,120</u>
13	<u>Inovasi program dan produk hukum desa</u>	<u>0,040</u>	<u>5,000</u>	<u>0,200</u>
14	<u>Ketersediaan lembaga dan layanan masyarakat</u>	<u>0,010</u>	<u>3,000</u>	<u>0,030</u>
15	<u>Kondisi lingkungan desa</u>	<u>0,010</u>	<u>3,000</u>	<u>0,030</u>
	<u>Jumlah Nilai Kekuatan (Strengths)</u>	<u>0,680</u>		<u>3,170</u>
	<u>Kelemahan (Weakness)</u>			
1	<u>Pemahaman masyarakat dalam pengurusan pelayanan</u>	<u>0,090</u>	<u>5,000</u>	<u>0,450</u>
2	<u>Sikap masyarakat</u>	<u>0,090</u>	<u>5,000</u>	<u>0,450</u>
3	<u>Pendidikan dan kemampuan masyarakat</u>	<u>0,080</u>	<u>5,000</u>	<u>0,400</u>
4	<u>Kondisi dan ketersediaan teknologi</u>	<u>0,050</u>	<u>4,000</u>	<u>0,200</u>
5	<u>Pemahaman perangkat desa</u>	<u>0,010</u>	<u>3,000</u>	<u>0,030</u>
	<u>Jumlah Nilai Kelemahan (Weakness)</u>	<u>0,320</u>		<u>1,530</u>
	<u>Jumlah Nilai Kekuatan-Kelemahan</u>	<u>1,000</u>		<u>1,640</u>
B	Faktor Eksternal			
	<u>Peluang (Opportunities)</u>			
1	<u>Perlindungan hukum</u>	<u>0,100</u>	<u>5,000</u>	<u>0,500</u>
2	<u>Otonomi desa</u>	<u>0,100</u>	<u>5,000</u>	<u>0,500</u>
3	<u>Komitmen pemerintah (pusat, provinsi, daerah) dalam membangun desa</u>	<u>0,080</u>	<u>4,000</u>	<u>0,320</u>
4	<u>Ketersediaan peraturan dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan kegiatan desa</u>	<u>0,080</u>	<u>4,000</u>	<u>0,320</u>
5	<u>Pembangunan gedung/bangunan/fisik</u>	<u>0,020</u>	<u>4,000</u>	<u>0,080</u>
6	<u>Dukungan dari berbagai pihak eksternal desa dalam membangun desa</u>	<u>0,060</u>	<u>4,000</u>	<u>0,240</u>
7	<u>Kemitraan dengan berbagai institusi pemerintah, swasta dan perguruan tinggi</u>	<u>0,060</u>	<u>4,000</u>	<u>0,240</u>
8	<u>Perkembangan Teknologi dan Informasi</u>	<u>0,020</u>	<u>3,000</u>	<u>0,060</u>
9	<u>Pemahaman masyarakat terkait Teknologi dan Informasi</u>	<u>0,020</u>	<u>3,000</u>	<u>0,060</u>
	<u>Jumlah Nilai Peluang (Opportunities)</u>	<u>0,540</u>		<u>2,320</u>
	<u>Ancaman (Threats)</u>			

<u>No</u>	<u>Uraian</u>	<u>Bobot</u>	<u>Rating</u>	<u>Nilai</u>
1	<u>Ketersediaan blangko administrasi kependudukan</u>	<u>0,100</u>	<u>5,000</u>	<u>0,500</u>
2	<u>Waktu pengurusan administrasi</u>	<u>0,070</u>	<u>4,000</u>	<u>0,280</u>
3	<u>Pencairan anggaran desa</u>	<u>0,070</u>	<u>5,000</u>	<u>0,350</u>
4	<u>Perubahan dan tumpang tindih kebijakan</u>	<u>0,060</u>	<u>4,000</u>	<u>0,240</u>
5	<u>Dukungan kebijakan</u>	<u>0,060</u>	<u>5,000</u>	<u>0,300</u>
6	<u>Koordinasi antar instansi</u>	<u>0,060</u>	<u>4,000</u>	<u>0,240</u>
7	<u>Alih fungsi lahan</u>	<u>0,020</u>	<u>3,000</u>	<u>0,060</u>
8	<u>Budaya asing</u>	<u>0,020</u>	<u>4,000</u>	<u>0,080</u>
Jumlah Nilai Ancaman (Threats)		0,460		2,050
Jumlah Nilai Peluang dan Ancaman		1,000		0,270

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2024



Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2024

Gambar 1. Kuadran Analisis SWOT

Berdasarkan gambar di atas, maka grand strategi penerapan kepemimpinan kepala desa di Desa Majasari menggunakan strategi agresif. Berdasarkan strategi tersebut, maka dapat diturunkan pada strategi operasional yang terpetakan pada matriks SWOT.

Tabel 2. Matriks SWOT Pada Desa Maju

IFAS	Kekuatan	Kelemahan
	<u>15 Indikator Kekuatan</u>	<u>5 Indikator Kelemahan</u>
EFAS		
Peluang		
9 Indikator Peluang	Strategi S-O: a. <u>Penguatan kepemimpinan kepala desa</u> b. <u>Penguatan inovasi pelayanan masyarakat</u> c. <u>Penguatan kerjasama</u> d. <u>Penerapan manajemen keuangan desa</u>	Strategi W-O: a. <u>Penguatan kapasitas SDM perangkat desa</u> b. <u>Peningkatan sarana prasarana pelayanan</u> c. <u>Kemudahan pengurusan pelayanan</u>
Ancaman		
8 Indikator Ancaman	Strategi S-T: a. <u>Penguatan budaya lokal</u> b. <u>Penguatan payung hukum dan kelembagaan</u> c. <u>Penguatan koordinasi</u>	Strategi W-T: a. <u>Penguatan kapasitas SDM masyarakat</u> b. <u>Peningkatan pendekatan kepada masyarakat</u> c. <u>Penggalian peluang dan potensi sumber pendapatan desa</u>

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2024

Berdasarkan analisis SWOT di atas, terlihat bahwa posisi Desa Majasari saat ini berada pada posisi strategi S-O. Berdasarkan kondisi tersebut, maka rumusan strategi operasional penerapan kepemimpinan kepala desa yakni penguatan kepemimpinan kepala desa, penguatan inovasi pelayanan masyarakat, penguatan kerjasama, dan penerapan manajemen keuangan desa.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut.

1. Kendala Penerapan Kepemimpinan Kepala Desa

Pada saat kepala desa ketika menerapkan kepemimpinan di Desa Majasari, kepala desa menghadapi berbagai kendala antara lain:

a. Pemahaman masyarakat dalam pengurusan pelayanan

Masyarakat masih kurang memahami ketika pengurusan pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa. Hal ini terlihat pada saat masyarakat mengurus pelayanan di kantor desa, masyarakat masih belum memahami prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan untuk pengurusan pelayanan sehingga membuat pelayanan menjadi lama. Hal ini disebabkan karena masyarakat harus melengkapi dan mengurus berbagai persyaratan yang diperlukan agar bisa mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan mereka. Kendala ini terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi segala persyaratan untuk mengurus pelayanan serta kurangnya keingintahuan atau komunikasi antar masyarakat ketika ingin mengurus pelayanan. Hasil penelitian ini senada dengan hasil

penelitian dari Akbar et al (2018), bahwa permasalahan pembangunan desa disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat karena pendidikan masyarakat yang rendah sehingga masyarakat hanya diam dan menerima hasil apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Desa [9].

b. Sikap Masyarakat

Sebagian masyarakat masih memiliki sikap acuh pada pembangunan desa sehingga kurangnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Padahal kepala desa, perangkat desa dan pihak lainnya sudah memberikan sosialisasi dan menginginkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kendala ini terjadi karena masyarakat memiliki perilaku yang kurang peduli dan acuh terhadap pembangunan desa yang diakibatkan oleh pergaulan dan budaya hedonis yang masuk ke kehidupan mereka. Selain itu, masyarakat juga kurang suka pada kepemimpinan, karakter, keluarga dan status kehidupan kepala desa. Padahal partisipasi masyarakat sangat penting untuk kelancaran pembangunan desa. Pembangunan desa dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan swadaya gotong royong. Hal ini senada dengan penelitian dari Mursyid (2015), bahwa kurangnya partisipasi masyarakat pada kemajuan desa [10]. Padahal pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi SDM sehingga perlu adanya peningkatan kualitas hidup, prakarsa, keterampilan melalui bimbingan dan bantuan dari berbagai instansi pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing [11]. Untuk itu diperlukan cara untuk melatih masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan dan ikut mengontrol penggunaan dana desa [6]. Hal ini disebabkan karena pemberdayaan masyarakat yang merupakan bagian dari pembangunan partisipatif diharapkan sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Sehingga pemberdayaan masyarakat pedesaan pada proses pembangunan memberikan ruang bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam tiap tahapan pembangunan [12].

c. Pendidikan dan kemampuan masyarakat

Pendidikan dan kemampuan masyarakat tergolong masih rendah. Hal ini disebabkan karena mayoritas pendidikan masyarakat adalah berpendidikan Sekolah Dasar, sehingga kemampuan berpikir masyarakat juga terbatas sehingga masyarakat sulit diajak untuk

membangun desa baik dari partisipasi, gagasan, dan lainnya. Selain kendala pada tingkat pendidikan, kendala lainnya yakni rendahnya kemampuan yang dimiliki masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang berperan aktif atau kurang mengikuti pelatihan, bimbingan dan metode peningkatan kemampuan lainnya. Sehingga kemampuan yang dimiliki masyarakat hanya bersumber secara otodidak atau warisan secara turun temurun yang diturunkan oleh keluarga. Menurut Santrock (2018), salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat kurang memandang penting pendidikan adalah ketidaktahuan akan pentingnya pendidikan bagi kelangsungan hidup, pola pikir dan pandangan masyarakat terhadap pendidikan. Pandangan ini biasaya terjadi pada masyarakat desa dan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu, permasalahan lainnya kurangnya sarana belajar yang ada di pedesaan [13]. Hasil ini senada dengan hasil penelitian dari Akbar et al (2018), bahwa permasalahan pembangunan desa disebabkan oleh rendahnya pendidikan masyarakat yang rendah sehingga masyarakat hanya diam dan menerima hasil apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Desa [9].

d. Kondisi dan ketersediaan teknologi

Teknologi yang digunakan untuk pelayanan terkadang mengalami error dan jumlahnya terbatas. Kendala ini terjadi karena komputer yang digunakan merupakan generasi lama, terjangkit virus, software bermasalah sehingga perlu diinstal ulang, jaringan bermasalah, dan kesalahan dalam pengoperasian komputer. Selain itu, jumlah komputer yang tersedia juga terbatas. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Desa kekurangan pendanaan untuk membeli komputer yang baru atau melakukan perawatan terhadap komputer. Selain itu, perangkat desa juga kurang memahami terkait dengan perawatan komputer. Dengan demikian, komputer yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat hanya mengandalkan beberapa komputer saja dengan kondisi seadanya. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Subadi (2019), bahwa permasalahan pada penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu keterbatasan sarana dan prasarana seperti komputer [14]. Sehingga sarana kerja pada kantor kepala desa perlu disediakan dengan memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas perangkat desa [15].

e. Pemahaman perangkat desa

Perangkat desa kurang paham pembuatan notulensi hasil rapat/pelatihan. Kendala ini terjadi pada saat perangkat desa mengikuti

rapat/ pelatihan yang diadakan oleh pihak eksternal. Pada saat perangkat desa selesai mengikuti rapat/ pelatihan, perangkat desa tidak mampu untuk membuat notulensi dari hasil rapat/ pelatihan tersebut. Sehingga perangkat desa tidak bisa menyampaikan secara tertulis hasil dari rapat/ pelatihan tersebut kepada semua pihak khususnya kepala desa. Padahal kepala desa sering meminta perangkat desa untuk membuat notulensi ketika mereka mengikuti rapat/ pelatihan dan menyampaikannya kepada kepala desa secara tertulis, karena apabila disampaikan secara tidak tertulis, cukup banyak informasi yang terlewat untuk tersampaikan kepada kepala desa. Kendala ini terjadi disebabkan karena keterbatasan pelatihan penulisan notulensi rapat/ pelatihan yang diikuti oleh perangkat desa sehingga kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa untuk membuat notulensi rapat/ pelatihan terbatas. Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian dari Damayanti et al (2023), bahwa rendahnya keahlian SDM menjadi kendala dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa [16]. Hal yang sama juga diungkapkan oleh hasil penelitian dari Zuliansyah et al (2020), bahwa kendala penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu banyak aparatur pemerintah desa yang belum memiliki sikap profesionalisme, belum bertindak efektif dan efisien, terbuka, belum bertanggungjawab ketika bekerja dan belum mampu merancang kebutuhan masyarakat yang partisipatif dan transparan. Hal ini disebabkan karena pendidikan dan kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa [6]. Hal senada juga diungkapkan dari hasil penelitian dari Nurmadijah (2021), bahwa sebagian besar perangkat desa memiliki kualitas SDM, skill dan pengalaman yang kurang memadai yang mengakibatkan kinerja perangkat desa kurang maksimal dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya sebagai pembantu kepala desa sehingga masalah ini secara tidak langsung mempengaruhi kinerja kepala desa [17].

Sementara itu, kendala eksternal yang dihadapi dalam penerapan kepemimpinan kepala desa di Desa Majasari antara lain sebagai berikut:

a. Ketersediaan blangko administrasi kependudukan

Jumlah blangko administrasi kependudukan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu masih terbatas. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus menunggu untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Kendala ini sering terjadi ketika pemerintah desa mengurus Kartu

Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ke kantor kecamatan atau Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, sedangkan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut jumlahnya sangat banyak yang merupakan masyarakat dari berbagai desa yang ada di Kabupaten Indramayu. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Adriyanto dan Kismartini (2016), bahwa permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan penerbitan KTP elektronik adalah ketersediaan blangko KTP-el yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan [18].

b. Waktu pengurusan administrasi

Pengurusan administrasi di kecamatan dan instansi tertentu di Pemerintah Kabupaten Indramayu memakan waktu yang panjang. Kendala ini terjadi disebabkan karena banyaknya masyarakat dari berbagai desa yang mengurus pelayanan administrasi kependudukan baik kepengurusan di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, serta pelayanan yang kurang cepat. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Subadi (2019) bahwa pelayanan kurang cepat karena kurangnya kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas [14]. Selain itu, dalam proses pengurusan administrasi adanya pungutan apabila ingin diproses secara cepat. Hal ini senada dengan penelitian dari Suwarno (2012), bahwa adanya pungutan yang memberatkan masyarakat berupa biaya administrasi atau biaya transportasi [19].

c. Pencairan Anggaran Desa

Jumlah anggaran desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Majasari masih terbatas, dan anggaran desa juga mengalami keterlambatan pencairan ketika pemerintah desa ingin mencairkan anggaran yang merupakan bantuan dari pemerintah. Akibatnya, pembangunan pun menjadi terlambat dan bahkan menjadi terbengkalai menunggu pencairan anggaran. Permasalahan ini terjadi karena jumlah anggaran (ADD, dana desa, dana pemprov) yang diterima oleh pemerintah desa setiap tahunnya terbatas. Akibatnya pembangunan juga menjadi terbatas dengan menyesuaikan besarnya jumlah anggaran, meskipun telah menggunakan dana swadaya dari masyarakat. Namun besaran anggaran swadaya yang didapatkan tidak besar mengingat bahwa jumlah penduduk Majasari tidak banyak dan mayoritas penghasilan masyarakat menengah kebawah. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian dari Ulhaq (2020), bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ada permasalahan keterlambatan pencairan dana

desa yang disebabkan oleh administrasi, sistem, dan sumber daya manusia [20].

d. Perubahan dan tumpang tindih kebijakan

Permasalahan ini terjadi karena adanya perubahan kebijakan dalam pengurusan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu ketika ingin mengurus pelayanan dan akibatnya pemerintah desa harus memberitahu kembali kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut, dan masyarakat harus belajar kembali dari nol untuk mendapatkan akses pelayanan tersebut. Akibatnya pelayanan menjadi lama. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Damayanti et al (2023), bahwa keahlian sumber daya manusia menjadi permasalahan dalam memahami peraturan yang berlaku karena rendahnya keahlian yang dimiliki oleh sumber daya manusia di desa [16].

Kebijakan juga sering mengalami perubahan dalam jangka waktu yang tidak lama, mungkin bisa dikatakan dalam 1 tahun terjadi 2 hingga 3 kali kebijakan. Selain itu, kebijakan dari pemerintah baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat mengalami tumpang tindih. Bahkan antar Kementrian atau Dinas terjadi tumpang tindih dalam mengeluarkan kebijakan, padahal isi kebijakan tersebut tidak jauh berbeda. Terjadinya tumpang tindih ini ketika pemerintah membuat kebijakan mengenai penerima bantuan, peran dan fungsi pemerintah desa, dan hal lainnya. Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian dari Zuliansyah et al (2020) bahwa Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Undang-Undang Desa yaitu kendala legislasi dan regulasi tentang desa. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya aturan yang diperlukan dan adanya kebingungan akibat banyaknya substansi aturan seperti aturan kelembagaan yang mengurus desa [6].

e. Dukungan Kebijakan

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkadang kurang mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa seperti batas usia dan pendidikan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin menjadi perangkat desa. Padahal orang tersebut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat di sekitar karena orang tersebut merupakan orang yang disegani di daerah tersebut sehingga mudah untuk mengajak masyarakat guna berpartisipasi pada pembangunan desa. Selain itu, ada juga masyarakat yg secara pendidikan masih rendah, namun memiliki pengalaman dan kemampuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya

dalam hal administrasi desa atau pelayanan desa. Selain itu kepala desa sulit memberhentikan perangkat desa yang kurang memberikan kontribusi pada penyelenggaraan Pemerintah Desa karena aturan yang berlaku. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Nurmadiyah (2021), bahwa kepala desa mengalami kesulitan untuk memberhentikan perangkat desa yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya serta kualitas yang memadai karena terbentur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 karena banyaknya proses yang harus dilalui untuk memberhentikan perangkat desa [17].

f. Koordinasi Antar Instansi

Instansi yang ingin melaksanakan program di Desa Majasari seperti pemberian bantuan terkadang tidak melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, sehingga bantuan yang diberikan kepada masyarakat kurang tepat sasaran. Sehingga masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut, mereka tidak mendapatkannya. Begitu juga sebaliknya, masyarakat yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan tersebut, akan tetapi mereka mendapatkan bantuan tersebut. Akibatnya ada kecemburuan di tengah masyarakat, dan menuding Pemerintah Desa tidak adil dan hanya mementingkan beberapa pihak. Selain itu, terkadang bantuan yang diberikan juga kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat merasa kurang puas dan memberikan kritik terhadap bantuan tersebut. Kemudian, pemberian bantuan juga beberapa kali salah desa. Bantuan yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Desa Majasari, namun diterima oleh Pemerintah Desa lain karena kurangnya koordinasi dengan Pemerintah Desa. Sehingga bantuan tersebut tidak dapat ditarik lagi karena sudah digunakan oleh Pemerintah Desa tersebut. Hasil penelitian ini senada dengan yang dikemukakan oleh Hidayat et al (2021), bahwa pelaksanaan pembangunan di desa masih belum berjalan secara optimal karena lemahnya koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa serta pihak lain [21].

g. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan cukup marak terjadi di Desa Majasari sehingga lahan pertanian semakin berkurang. Alih fungsi lahan terjadi ketika masyarakat memerlukan uang untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehingga lahan yang mereka miliki dijual kepada pihak lain. Lahan digunakan untuk membangun gedung/ rumah atau industri. Terjadinya alih fungsi lahan membuat mata pencaharian masyarakat

yang sebelumnya menjadi buruh tani atau petani, harus beralih atau bekerja ke sektor lain. Sehingga masyarakat harus melatih kemampuan mereka atau mencari cara agar bisa bekerja di sektor lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Kusdiane et al (2018), bahwa terdapat alih fungsi lahan di desa akibat pengembangan wilayah yang berdampak pada kehidupan petani di desa terutama generasi muda petani setempat sehingga semakin menurunnya lahan pertanian menjadi penorong dalam sulitnya terwujud regenerasi petani di desa [22].

h. Budaya Asing

Kendala lainnya yakni masuknya budaya asing ke masyarakat sehingga membuat masyarakat menjadi hedonis, acuh, dan kurang peduli terhadap pembangunan desa. Masuknya budaya asing ditengah masyarakat disebabkan oleh teknologi yang semakin berkembang sehingga masyarakat dengan mudah mengakses berbagai informasi dari internet melalui Handphone atau media lainnya. Selain itu, masuknya budaya asing disebabkan oleh pergaulan antar masyarakat desa dengan masyarakat kota, budaya asing yang dibawa oleh tenaga kerja yang pulang dari luar negeri. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Hasanah (2023), bahwa adanya pengaruh budaya asing yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat terhadap budaya lokal seperti matinya kesenian tradisional yang merupakan kearifan lokal dikarenakan dampak teknologi, dan adanya perubahan tata nilai di masyarakat [23].

2. Strategi Kepemimpinan Kepala Desa

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan bahwa grand strategi penerapan kepemimpinan kepala desa di Desa Majasari menggunakan strategi agresif dengan strategi operasional yaitu:

a. Penguatan kepemimpinan kepala desa.

Penguatan kepemimpinan kepala desa dilakukan agar pencapaian desa terus mengalami peningkatan. Penguatan kepemimpinan dilakukan oleh kepala desa yang didukung oleh semua stakeholder ketika menyelenggarakan pemerintahan desa. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Lahada (2018), bahwa kepemimpinan kepala desa sangat dibutuhkan sebagai motor penggerak dan pemberian motivasi kepada aparatur desa untuk membangkitkan dan mengarahkan dalam melaksanakan pekerjaan yang berhubungan

dengan pembangunan dan kemasyarakatan agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik [11].

b. Penguatan inovasi pelayanan masyarakat

Penguatan inovasi pelayanan masyarakat diperlukan guna mempermudah masyarakat dalam menggunakan pelayanan. Inovasi dapat dicetuskan oleh pemerintah desa dan semua pihak. Inovasi dapat dilaksanakan secepatnya ketika proses pemberian layanan kepada masyarakat agar permasalahan terkait pelayanan dapat teratasi. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Akbar et al (2018), bahwa kepala memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengemukakan aspirasi atau pikiran mengenai pembangunan Desa yang akan dilaksanakan karena mereka yang mengetahui kebutuhan dan permasalahan di desa [9].

c. Penguatan Kerjasama

Penguatan kerjasama dilakukan guna memperoleh berbagai bantuan dari semua pihak baik itu pendanaan, kegiatan pelatihan, beasiswa, hibah, tenaga dan pikiran, dan bantuan lainnya sehingga dapat memperkuat kepemimpinan kepala desa. Penguatan kerjasama dilakukan oleh pemerintah desa ketika akan menjalankan suatu kegiatan yang dilaksanakan di desa. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Mursyid (2015), bahwa Pemerintah Desa perlu meningkatkan pendekatan dengan masyarakat desa dan lembaga desa guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga desa [10].

d. Penerapan manajemen keuangan desa

Penerapan manajemen keuangan desa diperlukan agar desa bisa memanaj keuangan desa sehingga dapat membiayai kebutuhan pelaksanaan kegiatan desa. Sehingga diperlukan pelatihan manajemen keuangan yang dilaksanakan di desa dengan mengundang narasumber yang expert dibidang manajemen keuangan desa dan pemerintah desa sebagai pesertanya. Berdasarkan hasil penelitian dari Damayanti et al (2023), bahwa kendala pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya pemahaman dan keahlian dalam tata kelola keuangan desa yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa [16].

Simpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kendala dalam penerapan kepemimpinan kepala desa di Desa Majasari yaitu kendala administrasi. Sementara itu, grand strategi kepemimpinan kepala desa di Desa Majasari sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja perangkat desa yang merupakan cerminan kinerja Pemerintahan Desa yakni strategi agresif dengan strategi operasional yakni penguatan kepemimpinan kepala desa, penguatan inovasi pelayanan masyarakat, penguatan kerjasama, dan penerapan manajemen keuangan desa. Adapun rekomendasi berdasarkan hasil penelitian ini yaitu untuk menyelesaikan kendala pada penerapan kepemimpinan kepala desa di Desa Majasari dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi tata cara pengurusan pelayanan, pelatihan bagi perangkat desa tentang pembuatan notulensi rapat, perangkat desa mempelajari berbagai peraturan, pembuatan surat keterangan sementara dengan masa berlaku yang panjang, sosialisasi dan penyediaan program paket belajar atau beasiswa bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan, penambahan dan perbaikan sarana prasarana pelayanan, pendekatan kepada masyarakat secara intensif, dan pencarian sumber pendanaan. Untuk melaksanakan grand strategi kepemimpinan kepala desa di Desa Maju melalui pelatihan tentang kepemimpinan, bimbingan dan teknik tentang manajemen keuangan, melakukan *study banding* ke desa mandiri yang memiliki program yang unik, perlombaan tentang inovasi desa yang diikuti oleh masyarakat desa, dan pemberian fasilitasi program kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak.

Adapun kelemahan atau kekurangan pada penelitian ini yaitu jumlah informan yang terbatas dan tidak menggunakan metode untuk mengetahui sejauhmana pengaruh kendala internal dan eksternal pada penerapan pola kepemimpinan kepala desa. Sehingga saran bagi penelitian selanjutnya yang ingin memperkuat atau mengembangkan penelitian ini yakni dapat menambah informan pada penelitian sebagai sampel penelitian dan dapat menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode regresi linier atau metode sejenisnya untuk menguji hasil penelitian secara statistik sehingga akan terlihat semakin jelas hasil penelitian ini seperti pengaruh kendala internal dan eksternal terhadap pola kepemimpinan kepala desa yang berimplikasi pada kinerja perangkat desa atau kinerja pemerintah desa.

Daftar Rujukan

- [1] Hermansyah A, Pasciana R. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Sindanglaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *J Pembang Dan Kebijak Publik* 2018;9:1–11.
- [2] Putri AS, Febriyanti D, Amaliatulwalidain A. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Desa Sungai



- Kedukan. *J Soc Policy* 2022;2:140–5. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i3.11>.
- [3] Fathoni M, Suryadi S, Rengu SP. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). *J Adm Publik* 2015;3:139–46.
- [4] Lamangida T, Akbar MF, Hasan H. Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto. *Publik (Jurnal Ilmu Adm* 2017;6:68–78. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.1.68-78.2017>.
- [5] Rambe J. Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam *Mendukung Penerapan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media; 2018.
- [6] Zuliansyah A, Malik A, Adi BL. Membangun Desa Masa Depan Yang Ideal: Kendala dan Kebutuhan Pemerintahan Desa dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Desa. *Al-Mu'awanah J Pengabd Kpd Masy* 2020;1:19–28.
- [7] Hanafiah A, Wibowo MW, Damayanti F. Pengaruh Electronic Word of Mouth, Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Berkunjung Generasi Z Pada Destinasi Wisata Halal Provinsi Jawa Barat. *J Ilm Manaj Bisnis* 2020;6:347–64.
- [8] Gunartin G. Analysis of the Village Head's Leadership Style in Cidokom Gunung Sindur Village, Bogor District. *J Ilm Ilmu Adm Publik* 2020;10:75–84. <https://doi.org/10.26858/jiap.v10i1.13572>.
- [9] Akbar MF, Suprpto S, Surati S. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik (Jurnal Ilmu Adm* 2018;6:135. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.135-142.2017>.
- [10] Mursyid M. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi di Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara). *Governance* 2015;Volume 4 N:1–14.
- [11] Lahada G. Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten Poso. *J Ilm Adm* 2018;11:1–10.
- [12] Sugiman. *Pemerintah Desa*. Binamulia Huk 2018;7:82–5.
- [13] Rahman PRU. Gambaran Kesadaran Masyarakat Terhadap Pendidikan di Desa Kutaraja Kecamatan Kutawaluya Karawang. *Konf. Nas. Penelit. dan Pengabd. Ke-1 Univ. Buana Perjuangan Karawang, Kabupaten Karawang: Universitas Buana Perjuangan Karawang; 2021, p. 1288–95*.
- [14] Subadi W. Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggara Pemerintah Desa Ribang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tebalong (Studi Pada Kaur Pemerintahan). *PubBis (Jurnal Pemikir Dan Penelit Adm Publik Dan Adm Bisnis)* 2019;3:102–16.
- [15] Dolosi D, Dengo S, Kolondam H. Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Tobelos Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat. *J Adm Publik* 2018;1:1–8.
- [16] Damayanti AY, Afifah AN, Manarung H. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, serta Pertanggungjawaban. *Trending J Ekon Akunt Dan Manaj* 2023;1:132–41.



-
- [17] Nurmadiyah N. Problematika Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa NTB Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. JISIP (Jurnal Ilmu Sos Dan Pendidikan) 2021;5:327–30. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i1.1708>.
- [18] Adriyanto T, Kismartini. Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. J Public Policy Manag Rev 2016;5:1–13.
- [19] Suwarno J. Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa (Studi Pelayanan KTP dan KK di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu). J Ilmu Polit Dan Pemerintah Lokal 2012;1:184–213.
- [20] Ulhaq M. Faktor-Faktor Penghambat Penyaluran Dana Desa. J Ilm Univ Batanghari Jambi 2022;22:1900–7. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2763>.
- [21] Hidayat ES, Rahmah DN, Galuh U, Pembangunan E. Pengaruh Koordinasi Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan di Desa Danasari Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. J MODERAT 2021;7:139–50.
- [22] Kusdiane SD, Soetarto E, Sunito S. Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Masyarakat di Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. J Agribus Manag 2018;6:246–51.
- [23] Hasanah M. Dampak Kebudayaan Asing Terhadap Kebudayaan Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat. J Sociol Pendidik Dan Pendidik IPS 2023;1:1–8.